

**:: PELEBARAN JALAN SIMPANG KUDA-BENGGKONG**

# Tim Terpadu Layangkan SP 3

**BENGGKONG** – Tim Terpadu Pemko Batam melayangkan surat peringatan (SP) ketiga kepada pemilik bangunan, rumah dan kios di sepanjang Jalan Laksamana Bintan dari Simpang Kuda hingga Pos Babinsa Bengkong Shopping Centre untuk membongkar bangunan mereka.

Humas Pemko Batam Yudi Admadji mengatakan, berdasarkan pemeriksaan di lapangan bangunan di sepanjang jalan tersebut dibangun tanpa izin dari Pemko Batam maupun BP Batam, sehingga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 2 tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di Kota Batam.

Selain itu, warga juga me-



KORAN SINDO BATAM/TEGUH PRIHATNA

langgar Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang Kebersihan Kota Batam, Perda Nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

dan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan dan Gedung. "Pemilik bangunan tak mengindahkan SP pertama dan kedua,

sehingga Tim Terpadu melayangkan SP ketiga," ujarnya di Batam Centre, Selasa (6/3).

Ke hal 12))

Arus lalu lintas di kawasan Seipanas macet, Selasa (6/3). Sejumlah bangunan di sepanjang jalan ini akan dibongkar untuk pelebaran jalan.

# Tim Terpadu...

«Dari hal 9

Dia menambahkan, Tim Terpadu mengimbau agar pemilik bangunan agar segera membongkar dan mengosongkan lokasi terhitung 6 hingga 7 Maret mendatang. "Bila tetap tak direspons, Tim Terpadu akan langsung melakukan pembongkaran tanpa pemberitahuan terlebih dahulu," kata Yudi.

Salah seorang pemilik bangunan di Seipanas Kampung Bawean, Abdul Fatah mengatakan dirinya telah mengosongkan toko yang sehari-hari digunakan untuk usaha laundry. "Semenjak mendapatkan SP 1 saya sudah mulai menyicil mengosongkan barang-barang, biar gak repot nanti waktu dibongkar Satpol PP," ujarnya.

Fatah mengaku tak berkeinginan meminta uang paku pada Pemko Batam, sebab ia

menyadari bahwa tanah yang digunakan selama ini merupakan tanah milik pemerintah. "Saya mendukung Pemko. Apalagi digunakan untuk pelebaran jalan," kata bapak satu anak ini.

Seperti diketahui, Pemko Batam telah melayangkan surat peringatan (SP) kepada warga yang tinggal di bangunan liar di sejumlah proyek pelebaran jalan. Meski demikian, Pemko tetap mengedepankan langkah persuasif dalam penertiban nantinya.

Seperti diketahui, Wali Kota Batam sudah menyusun skala prioritas dalam menjalankan pembangunan di tahun 2018. Salah satunya, melanjutkan pembangunan infrastuktur dan pelebaran jalan guna menjadikan Batam sebagai kota pariwisata.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, rencana pembangunan sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, serta sinergi antara Pemko Batam dengan pemerintah pusat. "Anggaran sudah diketok, pembangunan infrastruktur tetap berjalan untuk persiapan menjadi kota Pariwisata," ujarnya di Batam Centre, Selasa (2/1).

Dengan adanya jalan yang lebar, tak berlubang, kemudian ada jalan khusus pejalan kaki, serta pedagang tertib harapannya wisatawan mancanegara (wisman) akan menikmati pariwisata yang disajikan. "Itulah yang mau kami kejar. Jadi orang datang betul-betul menikmati apa yang kami sajikan," katanya.

Dalam pelebaran jalan, sambung Rudi, tentunya terdapat rumah liar (Ruli) yang akan

ditertibkan. Dia mengatakan Pemko telah melayangkan Surat Pemberitahuan (SP) kepada warga yang tinggal di pinggir jalan untuk membongkar sendiri.

"Saya berharap masyarakat yang tinggal pingiran jalan bersedia tertibkan. Bongkar sendiri kalau tidak bisa, kalau enggak pakai tim. Sudah dimulai surat masuk tinggal Surat Peringatan (SP) 3 lagi," kata Wali Kota.

Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, Imam Tohari mengatakan, pelebaran jalan merupakan program Pemko Batam yang berkelanjutan termasuk di tahun 2018. Lokasi-lokasi pelebaran tersebut sudah diberikan Surat Peringatan (SP).

Ia menyebutkan, ada lima lokasi yang telah diberikan SP. Di antaranya Simpang Frengky-

Simpang BNI, Simpang BNI-Simpang Underpass, di mana keduanya suda SP 3. Kemudian Simpang Kuda-Simpang Bengkong Seken diberikan SP 1, dan akan naik menjadi SP 2. Sementara Simpang Gelael-Simpang Flyover sudah dibongkar tinggal pelaksanaan, dan Simpang Frengky-Kepri Mall sudah diberi SP 1. "Sedangkan antara Batuampar-Simpang Baloi Centre masih proses (imbauan)," kata mantan Lurah Seijodoh ini.

Menurut Imam, penertiban akan dilakukan secara aman dan damai karena merupakan perintah Wali Kota Batam Muhammad Rudi. "Perintah Pak Wali jangan sampai ada benturan jadi sama-sama enak. kami juga minta dukungan masyarakat dalam pengembangan pariwisata ini," ujarnya.

# 5 Negara Perebutkan Piala Wali Kota

**BATAM** – Tim sepak takraw dari lima negara bakal meramaikan turnamen Sepak Takraw Open Championship 2018 digelar Dispora Batam dan PSTI Batam. Laga-laga bisa disaksikan di GOR Raja Djakfar Tiban, Batam, pada akhir April mendatang.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Batam bekerjasama dengan Pengurus Kota Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Batam menggelar turnamen terbuka tersebut.

Tim akan memperebutkan piala bergilir Wali Kota Batam, piala tetap dan uang pembinaan. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi objek pariwisata yang ada di Batam, sekaligus ajang seleksi mempersiapkan atlet Batam menuju Porprov 2018.

Kepala Bidang Olahraga Dispora Batam Aisrin mengatakan, Dispora Batam mengundang tim dari lima negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, India, dan Indonesia. Dari Indonesia, yang akan diundang adalah utusan dari kabupaten/kota se-Kepri yang masing-masing mengirim satu regu.

"Seluruhnya ada 32 regu. Selain dari Kepri, ada juga dari Siak, Bengkalis, Pekanbaru, Jambi, Sumsel, Sumbar, Sumut, DKI, Jawa Barat," kata Aisrin, kemarin.

Untuk syarat pendaftaran, setiap regu tak diperkenankan mengutus atlet yang sedang menjalani hukuman, baik itu PB PSTI maupun dari ASTAF dan ISTAF. Pasalnya, atlet yang bermasalah akan membuat suatu pertandingan tidak fairplay.

Pendaftaran sudah dibuka mulai kemarin (Selasa, 6 Maret) dan penutupan pendaftaran paling lambat 7 hari sebelum technical meeting pada 27 April mendatang di ruang rapat Dispora Batam.

Aisrin menuturkan, Sepak Takraw Open Championship 2018 ini merupakan salah satu program kerja Dispora Batam, untuk mengembangkan cabor takraw, karena selama ini sepak takraw merupakan olahraga rakyat yang harus dilestarikan.

"Takraw Batam berprestasi, apalagi Batam maupun Kepri merupakan daerah tanah Melayu yang identik dengan permainan rakyat," ungkap Aisrin.

Ketua PSTI Batam Zakaria mengatakan, hanya satu nomor dipertandingkan, yakni nomor beregu putra dalam turnamen tersebut. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur, dari 32 regu dibagi menjadi dua grup, yakni grup A dan grup B nantinya. Juara 1 menerima uang pembinaan sebesar Rp10 juta, juara 2 Rp7 juta, juara 3 Rp5 juta, dan juara 4 Rp3 juta. "Ini turnamen paling bergengsi di Batam, dan saya berharap seluruh daerah mengirimkan tim terbaiknya," ujarnya.

Kepri mendapatkan regu paling banyak di ajang ini, dan merupakan kesempatan atlet untuk membuktikan diri.

# RKWB Gesa Legalitas Kampung Tua

**BATAM KOTA** – Ketua Umum Rumpun Khazanah Warisan Batam (RKWB), Machmur Ismail meminta dengan tegas kepada pemerintah segera melegalisasi kampung tua di Batam. Bahkan untuk mendapatkan legalitas kampung tua RKWB telah menyurati presiden pada tahun 2015 lalu. "Sayangnya meski presiden sudah membalas surat itu melalui Menteri Sekretaris Negara namun surat tersebut tak ditindaklanjuti Pemrov Kepri, BPN Tanjungpinang dan Badan Pengusahaan (BP) Batam," katanya, Selasa (6/3).

RKWB mendukung pemerintah untuk segera melakukan transformasi Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jika terlaksana maka urusan kemasayarakatan akan diurus sepenuhnya oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP mengatur industri.

Kampung tua tak bisa dilepaskan dari sejarah Batam. Bahkan sebelum pulau ini dikembangkan sebagai daerah industri pada awal 1970 an. Masyarakat asli telah berdiam di sana. Keberadaan kampung tua menurutnya telah diatur dalam SK Wali Kota Batam Nomor KPTS 105/HK/III/2004 tahun 2004 sebagai penetapan 32 titik kampung tua di wilayah mainland dari total 57 titik kampung tua di seluruh wilayah Batam.

"Kami ingin sertifikat hak milik dan bebas uang wajib tahunan (UWT). Kami tidak mau membayar UWT karena kontribusi kami sudah cukup banyak," ungkapnya.

Tahun 2010 lalu juga telah terbentuk Tim Penyelaras Peny-



DOK. KORANSINDOBATAM

**MACHMUR ISMAIL**

Ketua Umum RKWB

elelesaian Kampung Tua yang beranggotakan Pemko Batam bersama dengan BP Batam, BPN dan RKWB. Tahun 2012 tim telah melakukan verifikasi terhadap 5 kampung tua. Kemudian di 2013 terdapat 4 kampung tua yang diverifikasi, dan di 2014 terdapat 21 titik yang diverifikasi.

Dari verifikasi yang dilakukan, ternyata ada tiga titik kampung tua yang terlupakan dan tidak termasuk ke dalam SK Wali Kota. Tiga kampung tua itu, Kampung Tua Serangung, Kampung Tua Mentarau dan Kampung Tua Air Raja.

"Sehingga jumlahnya menjadi 37 titik. Kami minta verifikasi tapal batas kampung tua ini dilanjutkan, karena ke sininya Cuma Pemko Batam yang serius. Sementara BP Batam setengah hati untuk melakukan verifikasi," sebutnya lagi.

Menurutnya legalitas kampung tua sangat penting, angka kebutuhan lahan untuk industri tinggi. Sehingga mengancam keberadaan kampung tua. Sebagian besar kampung tua berada di pesisir pantai yang strategis bagi pengembangan ekonomi dan menarik minat investor.

● asrul rahmawati

# Tata Pelabuhan Pengumpulan Sambut Wisman

**SEKUPANG** – Pemerintah Kota (Pemko) Batam tata Pelabuhan Pengumpulan Sekupang untuk menambah kenyamanan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara (wisman) yang ingin berkunjung ke pulau-pulau penyangga.

"Nanti disiapkan ruang yang diperuntukkan untuk mendukung kepariwisataan," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri, kemarin.

Pelabuhan yang bersebelahan dengan Pelabuhan Internasional dan Pelabuhan Domestik Sekupang ini menjadi penghubung bagi pelancong

yang hendak melanjutkan perjalanan menuju pulau-pulau penyangga.

Selain wisatawan, pelabuhan itu juga melayani warga pulau penyangga menuju pulau utama. Yusfa menyatakan pelabuhan itu dibangun dalam tiga tahap yang selesai tahun lalu.

"Ruang rapat, kantor dan dermaga sudah selesai. Tinggal interior, seperti furniture," kata Yusfa.

Namun, pembangunan dan penambahan interior pelabuhan itu tidak dianggarkan tahun ini.

"Pembangunan tahap 4 yaitu

interiornya. Mudah-mudahan tahun depan," kata Yusfa.

Demi meningkatkan kenyamanan penumpang, Pemko juga mendorong seluruh pelabuhan yang ada di Sekupang terkoneksi, yaitu pelabuhan internasional, pelabuhan domestik dan pelabuhan pengumpulan, untuk memudahkan warga dan pelancong yang harus berpindah bandar laut.

"Kami minta agar terkoneksi, jadi wisman yang datang melalui pelabuhan internasional bisa langsung melanjutkan perjalanan ke domestik atau ke pengumpulan, begitu juga seba-

liknya," kata dia.

Saat ini, pelabuhan internasional dan domestik sudah terkoneksi. Sedangkan dari pelabuhan domestik menuju pelabuhan pengumpulan masih terpisah. Penumpang kapal domestik yang ingin melanjutkan pelayaran ke pulau penyangga harus berjalan ke luar untuk mencapai pelabuhan pengumpulan. Yusfa menyatakan sudah meminta BP Batam untuk membangun penyambung antar pelabuhan itu, demi memudahkan penumpang.

"Mereka sudah menyanggupi `connecting` pelabuhan yang

digunakan turis dari pelabuhan internasional dengan tujuan ke pulau," kata dia.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata itu, sebanyak 30 hingga 50 orang turis menggunakan pelabuhan pengumpulan setiap harinya. Wisman itu hendak berlayar menuju kawasan pariwisata Telunas di Kabupaten Karimun dan sejumlah pulau penyangga di Batam.

"Kalau mereka harus memutar ke luar kasihan, terlalu jauh. Bagusnya melalui `connecting`," kata Yusfa.

# Batuaji Prioritaskan Infrastruktur

**BATUAJI** – Tahun 2019 mendatang, Kecamatan Batuaji lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Hal itu sejalan dengan usulan warga Batuaji dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di Kantor Camat Batuaji, Senin (5/3) malam.

Pembangunan infrastruktur tersebut meliputi perbaikan jalan di lingkungan ataupun jalan utama, perbaikan drainase dan

pengadaan fasilitas pendidikan. Di 2019 Batuaji menerima Rp4,8 miliar untuk Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)

yang akan dibagikan kepada empat kelurahan. Hal itu sesuai dengan kebijakan kebijakan Wali Kota dan Wakil Walikota Batam, tiap kelurahan akan menerima Rp1,2 miliar untuk PIK.

Warga Kelurahan Buliang misalnya, menginginkan pembangunan gedung SDN 08 di Perumahan Griya Prima. Selama ini sekolah tersebut masih menumpang di SDN 02 Batuaji. Tokoh masyarakat Kelurahan Buliang, Arga mengatakan SDN 08 sudah empat tahun me-

numpang.

"Kita utamakan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dalam waktu dekat, seperti gedung SDN 08 ini, dengan jumlah siswanya 200 orang sudah harus punya gedung sendiri. Apalagi sebentar lagi penerimaan siswa lagi," katanya.

Sementara itu warga Tanjungcang mengusulkan perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan raya serta semenisasi jalan di lingkungan perumahan.

Camat Batuaji, Ridwan me-

nyebut jumlah usulan Musrenbang mencapai 50 usulan. Setiap kelurahan mengusulkan 10-15 program pembangunan untuk non PIK dan 30 usulan PIK. "Semua usulan rata-rata memang tenang pembangunan fisik infrastruktur," ujarnya.

Pihaknya menampung dan menyaring usulan-usulan tersebut. Usulan yang diprioritaskan kemudian akan dibawa ke Musrenbang tingkat kota.

"Dari total usulan, kami akan mengambil 50 persen saja. Itu

yang akan diprioritaskan. Usulan tersebut masih didominasi program pembangunan fisik infrastruktur," kata Ridwan.

Senada dengan Ridwan, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, usulan masyarakat Batuaji untuk pembangunan fisik infrastruktur cukup banyak. Namun, semua usulan tersebut akan diseleksi kembali sebab program usulan hanya 50 persen yang harus diprioritaskan.

"Tidak semua bisa diusul-

kan di musrenbang tingkat kota. Anggaran kita juga terbatas, jadi memang disaring lagi itu," kata Amsakar.

Amsakar mengatakan anggaran itu akan dibagi, tidak digunakan hanya untuk satu atau sebagian program saja. Namun, anggaran tersebut digunakan untuk semua yang menjadi program. "Jadi memang ada tahapannya masing-masing, tidak langsung terealisasi semua," ucapnya.